

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia setelah reformasi sampai sekarang ini mengalami banyak sekali perkembangan. Otonomi daerah memberikan dampak yang besar dalam pembangunan daerah, sehingga daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Peraturan otonomi daerah sudah tertera dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun konsep dari pelaksanaan otonomi daerah di tahun tersebut masih sangat minim, sehingga diperlukan kesiapan dari pemerintah pusat dan juga daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 2004 diberlakukan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan negara dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait urusan pemerintahan di daerah tersebut.

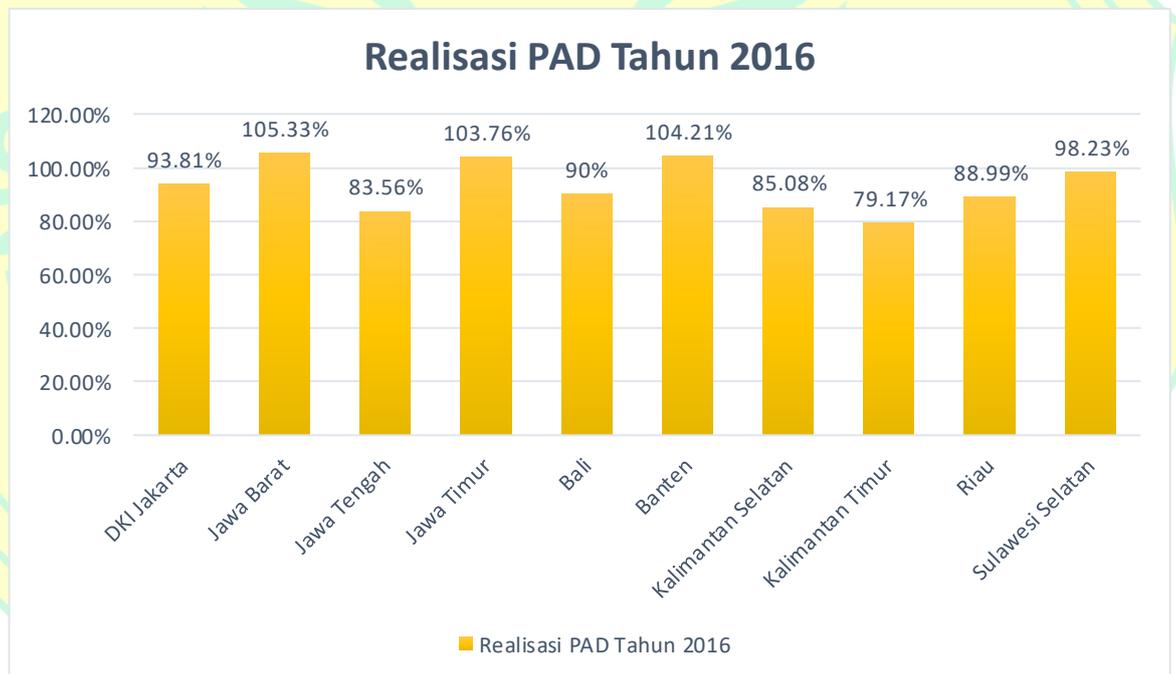
Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan daerah, serta menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yaitu dapat menggali dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Susanti *et al.* (2017) salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ialah dengan melihat nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Apabila PAD yang dihasilkan kecil maka akan menghambat untuk melakukan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut. Padahal dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai penyelenggaraan di daerahnya sendiri, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang harus dioptimalkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang dimiliki oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berasal dari kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Pendapatan asli daerah

terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim, 2002). PAD memiliki peranan penting dalam segi pembangunan dan terciptanya otonomi daerah dikarenakan dana tersebut milik pemerintah dan pemerintah berhak untuk mengatur dana tersebut (Wadjaudje et al., 2016). Di sisi lain pendapatan asli daerah juga berasal dari masyarakat, sehingga pemerintah sudah seharusnya memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola dana tersebut demi keberlangsungan daerahnya. Berikut ini merupakan data realisasi PAD beberapa Provinsi besar di Indonesia.



Gambar I. 1 Realisasi PAD Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2016

Sumber: Data DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Pendapatan asli daerah merupakan faktor untuk mengetahui tingkat kemandirian pada suatu daerah. Provinsi Jawa Barat memiliki data realisasi PAD yang tinggi pada tahun 2016 dibandingkan dengan beberapa provinsi

besar di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan PAD Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan melampaui target atau melebihi anggaran PAD yang telah dianggarkan sebelumnya dibandingkan dengan beberapa provinsi besar di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD.

Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan Provinsi Jawa Barat memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total dari pendapatan daerah di tahun 2016 sebesar 61,5 persen atau Rp 17.042 triliun, lalu dana rasio sebesar 38,3 persen atau Rp 10.622 triliun dan sisanya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 0,10 persen atau Rp 28.468 miliar. Pada tahun 2017 pendapatan asli daerah yang tertinggi didapatkan dari sektor pajak yaitu sebesar 92,28 persen. Sisanya berasal dari retribusi daerah 0,43 persen, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,89 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 5,40 persen. Kontribusi terbesar didapatkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu 36,29 persen terhadap pajak daerah, selanjutnya pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu sebesar 31,69% terhadap pajak daerah, yang ketiga yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 13,39% terhadap pajak daerah, yang keempat ialah Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 0,41 terhadap pajak daerah, dan terakhir yaitu dari Pajak Rokok sebesar 14,67 terhadap pajak daerah. Pencapaian tersebut merupakan suatu kerja nyata dari pemerintah

provinsi Jawa Barat dan juga kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan realisasi PAD Jawa Barat (Kompas, 2017).

Menurut Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki nilai investasi paling tinggi di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2018, kecuali di tahun 2017. Investasi yang paling diminati ialah pada sektor industri. Menurut Kepala DPMPTSP hal yang membuat investor tertarik berinvestasi di Jawa Barat ialah infrastruktur di Jawa Barat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi yang lain dan dengan adanya sistem online yang selalu diperbaiki sehingga investor menjadi lebih mudah (Kompas, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Jawa Barat tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 5,35%. PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat dicapai dari Usaha Real Estate yaitu berjumlah 9,64% .

Faktor yang mempengaruhi PAD ialah belanja modal. Belanja modal adalah salah satu sumber dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di daerah. Apabila pembangunan daerah berjalan dengan baik berarti hal tersebut merupakan bukti bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dipergunakan dengan baik untuk pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan cara untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi untuk

melaksanakan proses pembangunan di daerahnya, dan tentunya akan meningkatkan PAD (Novita *et al.*, 2016).

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tentunya akan membutuhkan modal yang besar agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Untuk mendapatkan modal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali dan meningkatkan potensi daerah sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya (Wadjaudje *et al.*, 2016). Dengan adanya investasi, pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan modal yang berguna untuk membiayai pengelolaan pembangunan yang ada di daerah. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap daerahnya dengan peningkatan PAD.

Pembangunan daerah juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan adanya segala jenis pembangunan daerah, pembangunan fasilitas bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dengan begitu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar *et al.* (2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap PDRB dikarenakan pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang membuat perekonomian di daerah tersebut juga berkembang seiring dengan adanya transaksi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan negara tetangga yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat.

Optimalisasi penerimaan PAD berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu cerminan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB menurut Badan Pusat Statistik ialah jumlah nilai tambah yang berasal dari seluruh sektor perekonomian pada suatu wilayah. PDRB yang ada pada suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah, dan juga PDRB dapat menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Asmuruf *et al.*, 2015). Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novita *et al.*, 2016) belanja modal berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo yang disebabkan dengan adanya peningkatan belanja modal, maka dampak dari pembangunan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap ketaatan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk tanggung jawab bagi mereka terhadap pemerintah daerah, dan akan memberikan terhadap peningkatan PAD.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh faktor lain yaitu investasi, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Novita *et al.*, 2016) investasi berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan dengan adanya penanaman modal atau investasi

akan memberikan dampak bagi pembangunan daerah dan juga kegiatan usaha pada berbagai jenis sektor. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat akan mampu dan mau untuk membayar pajak serta retribusi, tentunya akan meningkatkan PAD.

Terdapat pula penelitian yang meneliti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi PAD, (Triyanto, 2016) dalam penelitiannya menerangkan bahwa terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap PAD. Hal tersebut dikarenakan dengan berkembangnya berbagai jenis usaha di kabupaten/kota di Kalimantan Barat seperti hotel, perdagangan, dan restoran maka produk domestik regional bruto akan meningkat, sehingga hal tersebut akan memberikan peningkatan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang tentunya akan meningkatkan nilai PAD.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan juga dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan, maka dalam melaksanakan otonomi daerah perlu adanya peran pemerintah untuk mengelola keuangan daerahnya secara maksimal yaitu dengan menggali potensi PAD yang dimiliki oleh daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BELANJA MODAL DAN INVESTASI TERHADAP**

PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
2. Apakah Investasi memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
5. Apakah Investasi memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
6. Apakah Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto ?
7. Apakah Investasi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

2. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto
3. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah
5. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah
6. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto
7. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dengan waktu dan data yang berbeda, yaitu menggunakan data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan model yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan meneliti pengaruh tidak langsung belanja modal dan investasi terhadap pendapatan asli daerah melalui variabel Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel intervening.